

OPTIMALISASI FAKTOR RESOURCES COMMITTED (SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN) DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DI DESA SUNDAKERTA KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA

Kiki Sri Rizqi¹, Lina Marliani², Eet Saeful Hidayat³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : kiki_sri_rizqi@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum optimalnya faktor *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan) dalam Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut terlihat dari belum terpenuhinya ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya faktor *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan) dalam Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sumber data berupa data primer dengan 7 orang informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor faktor *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan) dalam Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan optimal, dilihat dalam Pemerintah Desa belum mampu menyediakan alat-alat penting seperti alat berat untuk pengerukan longsor, ambulan desa, dan APD (Alat Pelindung Diri) bagi relawan. Serta, masih terdapat kekurangan baik dari SDM masyarakat karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana maupun BPBD yang membuat pendampingan ke desa tidak bisa dilakukan secara rutin.

Kata Kunci : *Implementasi, Resources Committed (sumber daya yang digunakan), Program Desa Tangguh Bencana.*

PENDAHULUAN

Kondisi wilayah merupakan salah satu variabel penyebab terjadinya

bencana. Dari segi topografi, Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang bervariasi, dengan perbukitan,

pegunungan, dan Gunung Galunggung di sebelah utara, serta dataran bergelombang lemah hingga sedang di sebelah selatan hingga bagian tengah dan bergelombang kuat di bagian tengah. Curah hujan di Kabupaten Tasikmalaya rata-rata 3.442 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret (409 mm). Peluang terjadinya bencana dipengaruhi oleh kondisi curah hujan. Banjir dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi akibat topografi dataran rendah. Endapan aluvium dan batuan hasil letusan gunung api kuarterner, meliputi breksi, tuf, lava, lava basal, dan andesit, secara geologis meliputi Kabupaten Tasikmalaya.

Desa Sundakerta merupakan desa yang terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, yaitu di kaki Gunung Jaga. Desa ini merupakan zona merah yang rawan longsor dan banjir pada musim hujan. Dengan kemiringan 25 hingga 40, sebagian besar wilayah pemukiman Sundakerta merupakan lereng pegunungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dengan menciptakan desa tangguh bencana guna mengurangi dampak bencana di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Salah satunya di Desa Sundakerta yang memiliki Tingkat risiko Desa Sundakerta,

bencana alam yang paling sering terjadi disana adalah tanah longsor dan banjir. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prinsip Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menjadi acuan dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Desa dan kelurahan tangguh bencana adalah desa atau kelurahan yang mampu beradaptasi terhadap bahaya bencana, menghadapinya secara langsung, dan segera pulih dari dampak negatifnya jika terjadi bencana.

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus di dukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana sangat penting dalam melaksanakan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Dengan anggaran yang cukup, dapat melaksanakan kegiatan seperti pelatihan, simulasi bencana, dan pembangunan infrastruktur tangguh bencana. Sarana dan prasarana yang memadai juga memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana. Serta memungkinkan program desa tangguh bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam

menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak bencana.

Menurut pendapat dari Grindle (dalam Agustino, 2022 : 160) Pelaksanaan suatu implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya (*Resources Commiteed*) yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sehubungan uraian diatas dan hasil observasi yang penulis lakukan menunjukan bahwa Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran sehingga Pemerintah Desa belum mampu menyediakan alat-alat penting seperti alat berat untuk pengerukan longsor, ambulan desa, dan APD (Alat Pelindung Diri) bagi relawan.
2. Sumber Daya Manusia dalam Program Desa Tangguh Bencana dari segi masyarakat sebagai relawan dan BPBD masih kurang.

Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis faktor *Resources Committed (Sumber-sumber yang digunakan)* dalam Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya?”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui optimalisasi faktor *Resources Committed (Sumber-sumber yang digunakan)* dalam Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Sugiyono (2017: 9) mengatakan bahwa, metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme atau enterpretif digunakan untuk mempelajari kondisi obyek yang alamiah. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai daritahap pengumpulan data, treduksi data, display data serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Informan di dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya dalam implementasi kebijakan adalah segala bentuk input atau aset yang dibutuhkan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik secara efektif. Sumber daya ini mencakup unsur manusia (seperti tenaga pelaksana dan pejabat), informasi (data dan

pengetahuan yang relevan), keuangan (anggaran atau dana operasional), sarana dan prasarana (gedung, peralatan, teknologi), serta kewenangan atau otoritas hukum yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan.

Adapun sebagaimana menurut George C. Edward III (dalam Tahir, 2015:68), sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ia menyatakan bahwa tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya tetap tidak akan efektif. Sumber daya dalam konteks kebijakan mencakup staf atau tenaga pelaksana, informasi yang relevan, kewenangan atau otoritas untuk bertindak, serta sarana fisik seperti gedung, peralatan, dan perlengkapan. Ia menekankan bahwa kebijakan yang baik harus ditopang oleh sumber daya yang cukup agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara nyata. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Tahir, 2015:72) menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang tepat. Mereka mengartikan sumber daya sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, anggaran atau dana, waktu, dan informasi. Sumber daya ini berfungsi sebagai bahan bakar dalam

proses implementasi kebijakan agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Ketika sumber daya tidak memadai, maka potensi kegagalan implementasi sangat besar, terlepas dari seberapa rasional atau logis kebijakan tersebut.

Dengan demikian sumber daya (*resources committed*) merupakan salah aspek penting dalam implementasi kebijakan program desa tangguh bencana, sebagai mana menurut Grindle (dalam Agustino, 2022:160) Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila sasaran dan tujuan yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Dengan memperhatikan segala aspek yaitu salah satunya dari *Resources Committed* (Sumber-sumber yang digunakan).

Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai permasalahan yaitu Analisis faktor *Resources Committed* (*Sumber-sumber yang digunakan*) dalam Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk mengetahui sub dimensi *Resources Committed* (*Sumber-sumber*

yang digunakan), berikut hasil penelitian dengan indikator:

1. Adanya ketersediaan anggaran, sarana & prasarana dalam melaksanakan program desa tangguh bencana.

Ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana sangat penting dalam melaksanakan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Dengan anggaran yang cukup, dapat melaksanakan kegiatan seperti pelatihan, simulasi bencana, dan pembangunan infrastruktur tangguh bencana. Sarana dan prasarana yang memadai juga memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana. Serta memungkinkan program desa tangguh bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan menunjukkan bahwa mengenai ketersediaan anggaran, sarana & prasarana dalam melaksanakan program desa tangguh bencana. Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana untuk program Destana masih belum memadai, sehingga penyediaan sarana prasarana seperti APD dan peralatan lainnya masih kurang. Karena anggarannya belum dialokasikan secara penuh untuk program destana.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam indikator ketersediaan anggaran, sarana & prasarana dalam melaksanakan program desa tangguh bencana, penyediaan anggaran dan sarana prasarana masih kurang memadai. Belum tersedianya alat khusus penanggulangan bencana seperti alat berat untuk pengerukan ketika terjadi longsor, belum adanya ambulan desa serta masih kekurangan dalam penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para relawan ketika turun ke lokasi yang terkena dampak bencana. Dari segi anggaran terkadang tertunda seperti pada saat covid 19 melanda, dari pihak pemdes pun belum sepenuhnya bisa mengalokasikan dana desa untuk program ini karena adanya program lain yang harus diprioritaskan.

Analisis hasil dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa program Desa Tangguh Bencana (Destana) masih menghadapi kendala yang cukup serius, terutama dalam hal ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana. Anggaran yang tersedia untuk mendukung program ini belum dialokasikan secara penuh dan cenderung masih terbatas. Hal ini membuat desa belum mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti alat pelindung diri (APD) dan peralatan lainnya secara memadai untuk para relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dan juga terlihat bahwa sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam menghadapi bencana belum tersedia secara lengkap. Misalnya, belum ada ambulan desa, alat berat untuk pengerukan tanah saat terjadi longsor, serta masih kurangnya APD bagi para relawan. Kekurangan ini membuat proses penanganan bencana menjadi kurang optimal dan berpotensi membahayakan keselamatan relawan maupun warga yang terdampak. Selain itu, terkadang anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program Destana tertunda atau bahkan tidak tersedia karena pemerintah desa harus memprioritaskan program lain yang dianggap lebih mendesak. Situasi ini mencerminkan bahwa program Destana belum menjadi prioritas utama dalam penganggaran desa, sehingga pelaksanaannya belum berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator ketersediaan anggaran, sarana & prasarana dalam melaksanakan program desa tangguh bencana dalam implementasi program desa tangguh bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya hambatan yang ditemui.

Hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu, kurangnya anggaran yang diberikan dalam program desa tangguh benca karena beberapa alasan yaitu belum bisa sepenuhnya di alokasikan serta adanya program lain

yang harus diutamakan. Penyediaan sarana prasarana yang kurang memadai seperti kekurangan APD dan belum tersedianya ambulan serta alat pengerukan besar dalam menangani bencana longsor.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu, selalu meningkatkan mengenai anggaran dengan secara bertahap agar bisa lagi kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya kapasitas mereka semakin meningkat. Untuk peralatan terkadang meminjam melaui kerjasama dengan pihak lain seperti dengan dinas PUPR.

Hal ini belum sesuai dengan pendapat menurut Wildavsky, 1979 (dalam Purwanto, 2015:86), mengenai ketersediaan anggaran bahwa:

“besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan di pecahkan oleh kebijakan tersebut”.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa pada indikator ketersediaan anggaran, sarana & prasarana dalam melaksanakan program desa tangguh bencana belum memadai, karena keterbatasan anggaran Pemerintah Desa belum mampu menyediakan alat-alat penting seperti alat berat untuk

pengerukan longsor, ambulan desa, dan APD (Alat Pelindung Diri) bagi relawan. Karena keterbatasan ini, beberapa peralatan bahkan harus dipinjam dari instansi lain seperti Dinas PUPR.

Keterbatasan anggaran dan kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana mencerminkan rendahnya komitmen politik (*political will*) pemerintah desa terhadap isu penanggulangan bencana. alokasi anggaran yang belum memadai dan tidak menjadi prioritas utama menunjukkan bahwa program Destana belum sepenuhnya dianggap penting oleh pemerintah desa. Akibatnya, alat-alat penting untuk penanganan bencana seperti alat berat, ambulan, dan APD belum tersedia dan bahkan harus dipinjam dari instansi lain. Hal ini semakin memperkuat bahwa keberhasilan program Destana terhambat bukan hanya oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh kurangnya perhatian dan dukungan dari pihak yang berwenang.

2. Adanya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program desa tangguh bencana.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dapat berupa relawan, kader desa, petugas pemerintah desa, dan masyarakat desa lainnya yang

memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Mereka dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Destana, serta membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi, program Destana dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan dapat diketahui bahwa mengenai sumber daya manusia yang terlibat dalam desa tangguh bencana. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk program Destana masih belum memadai dari pihak lembaga maupun masyarakat desa masih mengalami kekurangan, karena keterbatasan jumlah pegawai dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam program destana. Dengan alasan tidak adanya upah yang diberikan kepada relawan, kesibukan masyarakat yang berbeda-beda, dan perpindahan atau peralihan profesi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam indikator Sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Desa Tangguh Bencana, bahwa sdm yang terlibat dalam destana ini masih adanya kekurangan. Seperti dilihat dari lembaga BPBD yang masih kekurangan terkait sdm sehingga ketika terjadinya

proses evakuasi bencana ataupun merespon terhadap terjadinya bencana menentukan melalui skala prioritas. Untuk masyarakat terkadang mengalami penurunan yang menjadi relawan karena adanya perubahan profesi atau pindah tempat tinggal dan banyak warga belum paham betul apa itu program Destana dan mengapa mereka perlu terlibat. Mereka mungkin menganggap bencana itu sudah menjadi bagian dari takdir, jadi tidak ada gunanya mempersiapkan diri. Akibatnya, mereka kurang tertarik ikut pelatihan atau kegiatan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana. Meskipun dari segi sdm mengalami kekurangan dari pihak lembaga tetapi pada saat pelaksanaannya kegiatan pelatihan banyak pegawai yang ikut turun agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik.

Analisis hasil dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Kekurangan SDM di BPBD menyebabkan proses penanganan bencana harus disesuaikan dengan skala prioritas karena keterbatasan pegawai. Dari sisi masyarakat, partisipasi relawan juga mengalami penurunan akibat berbagai faktor, seperti tidak adanya insentif, kesibukan sehari-hari, perpindahan tempat tinggal, hingga peralihan profesi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator Sumber daya manusia yang terlibat dalam desa tangguh bencana dalam implementasi program desa tangguh bencana di Desa Sundakerta

Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya hambatan yang ditemui.

Hambatan-hambatan yang ditemukan di yaitu, SDM dari masyarakat dan BPBD masih kurang. Dari beberapa masyarakat tidak bisa berpartisipasi aktif dalam program Desa Tangguh Bencana karena ada beberapa hal yang menjadi penghambat. Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak warga belum paham betul apa itu program Destana dan mengapa mereka perlu terlibat. Mereka mungkin menganggap bencana itu sudah menjadi bagian dari takdir, jadi tidak ada gunanya mempersiapkan diri. Akibatnya, mereka kurang tertarik ikut pelatihan atau kegiatan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana. Selain itu, Faktor ekonomi juga sering menjadi alasan. Banyak warga harus bekerja dari pagi sampai sore demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit meluangkan waktu untuk ikut pelatihan atau pertemuan yang diadakan oleh desa atau BPBD. Mereka ingin ikut, tapi keadaan tidak memungkinkan. Dan untuk pihak lembaga BPBD karena terbatasnya pegawai yang dimilikinya sehingga hanya beberapa saja yang sering mengunjungi ke desa sundakerta yang memantau kondisi atau berkumpul dengan para relawan untuk bersilaturahmi atau berdiskusi mengenai kondisi sekitar.

Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, masyarakat selalu berusaha mengikuti seperti pada saat adanya bencana yang terjadi atau dalam kegiatan pembersihan sarana sarana umum yang ada di desa. Lembaga bpbd juga selalu berkomunikasi dengan baik meskipun tidak bisa dating langsung melalui sosial media dan dalam menyelenggarakan kegiatan seperti pelatihan memberikan dukungan sdm yang cukup agar pelatihan itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bencana.

Hal ini belum sesuai dengan pendapat menurut Goggin et. al, 1990 (dalam Purwanto, 2015:149) mengenai sumber daya manusia bahwa :

“jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandate untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan”.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa pada indikator sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Desa Tangguh Bencana SDM dari masyarakat dan BPBD masih kurang. Dan untuk pihak lembaga BPBD karena terbatasnya pegawai yang dimilikinya sehingga hanya beberapa saja yang sering mengunjungi ke desa sundakerta yang memantau kondisi atau berkumpul

dengan para relawan untuk bersilaturahmi atau berdiskusi mengenai kondisi sekitar. Serta dalam melakukan penanganan kebencanaan pun karena kurangnya pegawai yang dimiliki sebelum turun kelapangan menentukan melalui skala prioritas terlebih dahulu jika kejadian bencana terjadi di waktu yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa analisis faktor *Resources Committed (Sumber-sumber yang digunakan)* dalam Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari kedua indikator yang belum optimal. Masih terdapat indikator yang belum dilaksanakan dengan baik, sehingga *Resources Committed (Sumber-sumber yang digunakan)* belum berjalan secara optimal.

Adapun hambatan yang ditemui yaitu Pemerintah Desa belum mampu menyediakan alat-alat penting seperti alat berat untuk pengerukan longsor, ambulan desa, dan APD (Alat Pelindung Diri) bagi relawan. Serta, masih terdapat kekurangan baik dari SDM masyarakat karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana maupun BPBD yang membuat

pendampingan ke desa tidak bisa dilakukan secara rutin.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu, selalu memingkatkan mengenai anggaran dengan secara bertahap agar bisa lagi kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya kapasitas mereka semakin meningkat. Untuk peralatan terkadang meminjam melalui kerjasama dengan pihak lain seperti dengan dinas PUPR. Serta masyarakat harus diberikan dorongan agar ikut serta seperti pada saat adanya bencana yang terjadi atau dalam kegiatan pembersihan sarana sarana umum yang ada di desa. Lembaga bpbd juga selalu berkomunikasi dengan baik meskipun tidak bisa datang langsung melalui sosial media dan dalam menyelenggarakan kegiatan seperti pelatihan memberikan dukungan SDM yang cukup agar pelatihan itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Tahir, 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan*

Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Agustino, 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Abdul Wahab, Sholichin. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Purwanto, 2018. *Komunikasi Bencana: Aspek Penting Pengurangan Risiko Bencana*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Erwan, Dyah, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Nugroho, 2016. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.